BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Senjata nuklir pada dasarnya merupakan isu menarik dalam hubungan internasional. Nuklir menjadi isu penting bagi komunitas internasional ketika membahas mengenai kepemilikan maupun uji coba senjata nuklirnya. Namun isu nuklir ini selalu mengundang kontroversi di tingkat internasional karena merupakan ancaman yang sangat besar seperti yang terjadi pada Korea Utara saat ini. negara Korea Utara merupakan negara yang sangat di kecam oleh aktor-aktor internasional karena telah melakukan uji coba nuklirnya sebanyak 6 kali. (CNN.news, 2018). Padahal negara Korea Utara tersebut bukanlah negara pemilik senjata nuklir atau *Non nuclear weapon state,* bahkan korea utara telah menandatangani *Non Prolifration Treaty (NPT)* sehingga melanggar isi perjanjian *Non Proliferation treaty* (NPT) tersebut.

Isi perjanjian itu berbunyi setiap negara yang telah memiliki senjata nuklir atau *Nuclear Weapon State* dilarang untuk menambah jumlah nuklir dan melakukan transfer senjata nuklirnya ke negara yang bukan pemilik nuklir, sedangkan negara yang bukan pemilik nuklir dilarang memproduksi dan menerima bantuan pembuatan nuklir atau alat peledak lainnya (Johnson, 2010). Namun keluarnya Korea Utara dari NPT menciptakan krisis nuklir Korea Utara yang pertama. Pasalnya Korea Utara merupakan negara pertama yang mundur dari perjanjian NPT (Schlein, 2018).

Dengan keluarnya Korea Utara, wilayah Asia Timur memasuki babak baru Multilateralisme yang belum pernah terjadi sebelumnya, dimana dalam krisis nuklir

Korea Utara ini banyak pihak yang akan turut andil dalam penyelesaian sengketa nuklir. Pasalnya dengan adanya krisis nuklir inilah terbentuknya *Three party talk (TPT)* dan *Six party talk (SPT)* yang akan membahas dan menyelesaikan permasalahan nuklir yang terus berlanjut. Krisis ini juga yang menyebabkan melunjaknya proliferasi Nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara sampai kepada peningkatan Uji coba nuklir yang dimilikinya. (Ying, 2017)

Tiga bulan setelah keluar, Korea Utara mengumumkan bahwa ia memiliki senjata nuklir yang membuat negara-negara di kawasan menentang hal tersebut. (Trott, 2018) Kemudian dibentuklah sebuah kerjasama Trilateral yang dipelopori oleh Tiongkok guna untuk meredakan ketegangan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat berambisi untuk melakukan opsi militer dalam penyelesaian permasalahan nuklir, sementara Korea Utara juga berambisi untuk tetap mempertahankan opsi nuklirnya. Untuk membendung hal tersebut dibentuklah kerjasama bernama *Three party talk (TPT)* yang terjadi pada April 2003 antara AS, Tiongkok, dan Korea Utara. Namun Amerika Serikat menolak untuk bertemu secara langsung dengan Korea Utara dan menginginkan pembicaraan dengan melibatkan sekutunya yaitu Jepang dan Korea Selatan. Disisi lain Tiongkok juga menyarankan untuk melibatkan Rusia dalam TPT (Ying, 2017, hal. 9-10).

Ketika semua negara telah menyetujui untuk melakukan perundingan, dengan begitu dibentuklah perundingan yang bernama Six Party Talk (SPT) pada Agustus 2003 untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Korea Utara. Perundingan terus dilakukan dalam beberapa tahap atau putaran yang kemudian menghasilkan suatu perjanjian pada September 2005, yang menyatakan bahwa Korea Utara setuju

untuk meninggalkan program nuklirnya dan akan bergabung kembali dengan NPT serta juga memungkinkan untuk menerima kembali IAEA. (Jayshree Bajoria, 2013)

Namun persetujuan Korea Utara akan hal tersebut juga menginginkan imbalan yaitu bantuan energi serta harapan atas rasa hormat kepada Korea Utara tentang hak untuk menggunakan energi nuklir secara damai dan setuju untuk membahas mengenai penyediaan reaktor nuklir ringan (Liang, 2018). Namun ada beberapa kendala yang mengakibatkan aktifnya uji coba nuklir Korea Utara seperti pada sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Korea Utara. Hal tersebut didasarkan pada Amerika Serikat atas dasar Korea Utara tetap memproduksi senjata nuklirnya pada Februari 2005 dan Amerika Serikat menuduh Banco Delta Asia (BDA) yang berbasis di Macau membantu Korea Utara mengenai pencucian uang dan mengedarkan uang kertas palsu untuk mendukung aksi terorisme. Dalam menghadapi peningkatan sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat, Korea Utara secara terbuka menyatakan tidak akan kembali ke Six Party Talks sampai Amerika Serikat menghapus sanksi ekonomi tersebut. Namun sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat justru meningkat pada April 2006 yang memicu uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara sebagai bentuk penolakan sanksi tersebut. (Ying, 2017, hal. 13-14)

Sengketa nuklir Korea Utara memanas pada saat Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang pertama pada 9 Oktober 2006 dengan menggunakan metode system bawah tanah dan kekuatannya di perkirakan sekitar 0,5 KT. Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya di sekitar kawasan Punggye-ri Korea Utara (Emma Chanlett-Avery, 2006). Meskipun demikian banyak dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok dan Korea Selatan berasumsi

bahwasanya uji coba nuklir tersebut di anggap gagal, karena hasil ledaknya lebih kecil dari yang diperkirakan Jika dibandingkan dengan negara yang telah melakukan uji coba nuklir seperti Pakistan, Tiongkok, Inggris, Amerika dan Rusia, Korea Utara sangat tertinggal jauh Karena Rata-rata ledakan yang dihasilkan negara-negara besar tersebut dalam menguji coba nuklirnya berkisar sekitar 20 – 60 KT (Lin, 2006). Walaupun demikian tetap saja uji coba nuklir tersebut mengundang reaksi yang keras dari berbagai negara, pasalnya negara Korea Utara telah melanggar perjanjian sebagai negara NPT (Kang, 2006). Sehingga dapat membuat keamanan di kawasan Asia Timur menjadi tidak stabil (North Korea, 2017).

Oleh sebab itu DK PBB pun mulai memberi sanksi kepada Korea Utara atas uji coba nuklirnya. Dalam resolusi 1718 yang mengharuskan Korea Utara : 1). tidak lagi melakukan uji coba nuklir, 2) tidak meluncurkan Rudal Balistik, 3). meninggalkan semua senjata nuklir dan program nuklirnya. PBB juga memberlakukan larangan ekspor dan impor produk militer Korea Utara dan negara anggota PBB juga diharuskan membekukan aset individu negaranya dari perusahaan Korea Utara yang terlibat dalam program nuklir serta larangan perjalanan bagi oknum-oknum yang terkait dalam kegiatan nuklir Korea Utara. (UNSCR, 2006)

Bahkan setelah melakukan uji coba nuklir pertamanya, Korea Utara di undang untuk kembali ke dalam pertemuan Internasional Six Party Talks yang dulunya sempat tertunda akibat permasalahan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat untuk membahas mengenai uji coba nuklirnya, namun Korea Utara menolak untuk menghadiri pertemuan tersebut. (agencies, 2006) Penolakan pertemuan yang dilakukan oleh Korea Utara itu dikarenakan Korea Utara menginginkan untuk

mengadakan pembicaraan bilateral dengan Amerika Serikat agar dapat melepaskan tekanan ekonomi negaranya dan menghapus daftar nama negara Korea Utara sebagai teoris di semenanjung Korea. (Jie-Ae, 2006)

Sanksi yang diberikan oleh DK PBB tidak membuat Korea Utara takut, namun justru malah semakin meningkatkan keinginannya untuk melakukan uji coba nuklir selanjutnya. Hal tersebut bisa dilihat pada 25 mei 2009, saat Korea Utara melakukan uji coba nuklir keduanya yang bisa dibilang lebih sukses dibandingkan uji coba nuklir sebelumnya. Dalam uji coba nuklir yang kedua ini Korea Utara kembali menggunakan metode sistem bawah tanah dan kekuatan yang dihasilkan dari uji coba nuklir kedua ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya yaitu 1-3 KT (Fedchenko, 2009). bahkan negara di sekitar Korea Utara dapat merasakan efek dari uji coba nuklir tersebut seperti gempa yang dirasakan oleh masyarakat Korea Selatan (Kim S. , 2009).

Kejadian tersebut membuat berbagai negara mengecam keras atas tindakan Korea Utara tersebut terutama Jepang. Hal ini bisa dilihat ketika Jepang menekan DK PBB untuk mengadakan pertemuan darurat serta memberikan sanksi yang tegas kepada Korea Utara yang telah melanggar resolusi DK PBB (CBS, 2009). Sehingga DK PBB memberlakukan sanksi yang baru dan lebih kuat kepada Korea Utara yakni resolusi 1874 yang berisikan embargo senjata dengan melarang semua impor dan ekspor produk senjata, membatasi bantuan keuangan pada rezim yang dapat digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir dan mendesak negara anggota PBB untuk memeriksa dan menggeledah kargo yang masuk ke Korea Utara (Philipp, 2017). Di sisi lain Presiden Amerikas Serikat Barack Obama juga berupaya untuk mengajak kembali Korea Utara untuk membicarakan permasalahan

proliferasi nuklirnya ke Six Party Talks, namun Korea Utara kembali menolak ajakan tersebut (Gabbatt, 2009). Bahkan Korea Utara menyatakan diri untuk keluar sepihak dari pertemuan Six Party Talk, yang menjadikan pertemuan Six Party Talk dianggap gagal dalam penyelesaian permasalahan nuklir Korea Utara (Xu, 2013).

Namun pada Kepemimpinan Kim Jong Un, Korea Utara lebih agresif dalam program nuklirnya. Hal ini bisa dilihat ketika Korea Utara yang lebih sering melakukan tes nuklirnya sampai sebanyak 4 kali yaitu pada Februari 2013, september 2016 dua kali dan september 2017. (the straits times, 2018) Banyaknya uji coba nuklir yang dilakukan membuat negara-negara di regional Asia Timur menjadi negara yang paling terancam dari dampak uji coba nuklir. Sebagai bentuk pertahanan terhadap ancaman nuklir korea utara, negara di kawasan Asia Timur melakukan upaya dalam menghentikan proliferasi nuklir Korea Utara, salah satunya Tiongkok.

Dalam sengketa program nuklir Korea Utara ini, posisi Tiongkok dianggap sangat penting dikarenakan Tiongkok dan Korea Utara dipandang sebagai sekutu terdekat, karena negara tersebut saling membutuhkan satu sama lainnya. Kebutuhan Korea Utara kepada Tiongkok terlihat dari sisi ekonomi, politik dan militer. Korea Utara sebagai mitra dagang Tiongkok mendapatkan pasokan perekonomian yaitu sumber makanan dan energi utama seperti minyak dan gas bagi Korea Utara. (Albert, 2018) Namun disisi lain, posisi Korea Utara tidak terlalu menguntungkan bagi Tiongkok. Walaupun demikian, Korea Utara tetap merupakan negara yang penting bagi Tiongkok, oleh sebab itulah Tiongkok terus mempertahankan dan mendukung rezim Korea Utara ketika negara tersebut mendapatkan sanksi dari PBB. Kebutuhan Tiongkok dari Korea Utara dapat dilihat ketika Tiongkok

menjadikan Korea Utara sebagai *buffer zone* dari pengaruh militer maupun Liberalism Amerika Serikat, dengan begitulah Tiongkok selalu menjaga eksistensi Korea Utara (Dingli, 2006).

Ada perbedaan manajemen dalam pengelolaan konflik pada masa Hu Jintao dan Xi Jinping. Dimana respon pada masa Hu Jin Tao terkait mengenai uji coba nuklir Korea Utara ini memang tidak mendukung proliferasi nuklir tersebut, namun Tiongkok seakan-akan terlihat bertolak belakang dengan apa yang telah dikatakannya. Hal ini bisa dilihat ketika Tiongkok berusaha melakukan dukungan diplomatisnya terhadap Korea Utara yang telah ditetapkan sanksi oleh DK PBB pada uji coba nuklir Korea Utara yang pertama di tahun 2006. Pasca di jatuhkannya sanksi tersebut Tiongkok tetap melakukan ekspor kendaraan militer ke Korea Utara padahal dalam sanksi tersebut mengatakan larangan ekspor dan impor produk militer, hal ini menandakan Tiongkok berpihak kepada Korea Utara karena tidak mengindahkan resolusi yang telah di berikan PBB tersebut (Isnaeni, 2017).

Tak hanya sekali, dukungan diplomatis juga dilakukan Tiongkok pada uji coba nuklir yang kedua pada mei 2009, PBB kemudian memperkuat sanksinya dengan resolusi 1874 yang berisikan embargo senjata dengan melarang semua impor dan ekspor senjata, membatasi bantuan keuangan pada rezim yang dapat digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir Korea Utara dan mendesak negara anggota PBB untuk memeriksa dan menggeledah kargo yang masuk ke Korea Utara (Mary Beth Nikitin, 2015). Sikap Tiongkok terlihat mendukung Korea Utara dengan cara mengusulkan agar tidak mengikat inspeksi kapal dan Kargo tersebut, bahkan Tiongkok tetap menjual senjata ringan ke Korea Utara karena DK PBB

tidak memasukan penjualan senjata ringan dalam mekanisme embargo ekspor dan impor senjata ke Korea Utara (Mahrita, 2016).

Pada tahun 2013, Tiongkok mengalami pergantian pemerintah dari pemerintahan Hu Jintao ke pemerintahan Xi Jinping. Namun pada pemerintahan Xi Jinping, respon yang diberikan mengenai uji coba senjata nuklir tersebut mengalami perubahan, dari lunak menjadi tegas kepada Korea Utara dalam sengketa uji coba nuklir. Dimana Tiongkok yang dulunya enggan bekerja sama dengan DK PBB tapi pada pemerintahan Xi Jinping malah bekerja sama dengan DK PBB serta seakan tidak mau memberikan dukungan diplomatis kepada Korea Utara dan berbalik mengecam uji coba Nuklir tersebut. hal ini terlihat ketika Korea Utara melakukan uji coba Nuklirnya yang ketiga pada tahun 2013, Xi Jinping sebagai presiden Tiongkok mengatakan bahwasanya uji coba Nuklir Korea Utara yang ketiga pada tahun 2013 merupakan sumber ancaman sehingga menjadikan kawasan regional Asia Timur menjadi tidak stabil dan meminta Korea Utara untuk menghentikan uji coba nuklir tersebut (Liu, 2014).

Tiongkok bahkan mulai menyetujui sanksi yang diberikan oleh DK PBB ke Korea Utara yang menyatakan pembatasan pasokan bantuan dan perdagangan minyak serta kebutuhan lainnya (David E sanger, 2013). Terbukti pada tahun 2014 Tiongkok tidak mengekspor minyak ke Korea Utara (Yonhap, 2015). Tak hanya itu kementrian perdagangan Tiongkok juga menghentikan sementara impor batubara dari Korea Utara pada bulan Februari 2017 seiring dengan meningkatnya uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara. Walaupun Tiongkok memberlakukan sanksi yang diterapkan oleh DK PBB tersebut, namun sanksi yang diberikan tidak untuk menghancurkan atau melengserkan rezim Korea Utara karena keberlangsungan

rezim Korea Utara di anggap penting bagi Tiongkok. Apabila rezim Korea Utara hancur, para pengungsi di Korea Utara akan pergi ke Tiongkok sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan keamanan di Tingkok (Albert, 2018)

Hal ini menandakan adanya perubahan dalam merespon antara pemimpin Tiongkok terhadap isu nuklir Korea Utara. Dimana pada periode Xi jinping menjabat sebagai presiden terlihat bahwasanya Tiongkok lebih cenderung tegas untuk ingin menghentikan program nuklir Korea Utara dengan berbagai tekanan yang telah diberikan kepada Korea Utara bahkan Tiongkok pun mulai untuk memberlakukan sanksi yang diberikan oleh DK PBB ke Korea Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih mengenai perubahan sikap Tiongkok dalam merespon isu nuklir Korea Utara yang menyebabkan ketidakstabilan di kawasan Asia Timur. Maka, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah **Mengapa Tiongkok Di Era Xi Jinping Mengimplementasikan Sanksi DK PBB Dalam Isu Nuklir Korea Utara ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat bagaimana respon Tiongkok terhadap sengketa nuklir Korea Utara pada periode Xi Jinping (2013-2018)
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan respon Tiongkok yang mulai mau untuk mengimplementasikan sanksi terhadap Korea Utara.

1.4 Signifikansi

Pentingnya Penelitian ini dikarenakan Tiongkok merupakan negara besar yang memiliki kedekatan dengan Korea Utara, bahkan Tiongkok dipandang sebagai sekutu terdekat dari Korea Utara. Perekonomi Korea Utara juga sebagian besar di bantu oleh Tiongkok dan Tiongkok pun pernah melakukan pendekatan politis dalam permasalahan nuklir Korea Utara pada pemerintahan Hu Jintao. Tiongkok mendukung Korea Utara dalam hal keberadaan nuklirnya, terlihat ketika Tiongkok tidak mengindahkan sanksi yang ditetapkan oleh DK PBB kepada Korea Utara. Namun perubahan terjadi ketika pada masa pemerintahan Xi Jinping yang lebih menginginkan untuk penghentian program nuklir Korea Utara. Bahkan Xi Jinping pun malah menerapkan sanksi yang diberikan oleh DK PBB kepada Korea Utara. Perubahan tersebut tentu saja ada faktor-faktor yang terjadi antara Tiongkok dengan Korea Utara. Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menjelaskan titik balik perubahan arah hubungan Tiongkok dengan Korea Utara yang terjadi pada pemerintahan Xi Jinping.

1.5 Cakupan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai respon Tiongkok terhadap sengketa nuklir Korea Utara pada kepemimpinan Xi Jinping. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena pada masa kepemimpinan Xi Jinping Tiongkok cenderung lebih tegas dalam merespon proliferasi nuklir Korea Utara karena telah mau untuk mengimplementasikan sanksi yang diberikan oleh DK PBB. Dalam penelitian ini, diharapkan mampu untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong Presiden Xi Jinping untuk mengambil respon yang lebih tegas tersebut.

1.6 Kajian Pustaka

Dalam penelitian yang membahas mengenai isu nuklir Korea Utara, sebenarnya sudah ada beberapa penelitian yang ikut menganalisis permasalahan ini baik dalam buku, jurnal, maupun artikel. Penelitian yang penulis anggap cukup relevan untuk penelitian ini akan penulis jadikan sebagai bahan tinjauan pustaka. Seperti yang ada dalam artikel hubungan internasional yang di tulis oleh Tirta Utama Umbas yang berjudul *Sino-North Korean Relations : China Tackling The North Korean Dilemma Under A Realist Framework* dalam tulisan ini membahas mengenai bagaimana perkembangan hubungan Sino-North Korea serta tindakan Tiongkok dalam perkembangan tersebut. Dalam tulisan tersebut mengatakan bahwasanya hubungan Sino-North Korea ini berawal ketika perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Perang tersebut dilancarkan pada 1950 hingga 1953 dimana Korea Utara di dukung oleh Tiongkok dan Uni Soviet sementara Korea Selatan di dukung oleh Amerika Serika.

Perang ini didasari oleh pertarungan politik dan ideologi yang mana Tiongkok dan Uni Soviet memegang ideologi komunis sementara Amerika Serikat memegang ideologi Demokrasi. Peran dari dinasti kim sangat penting dalam kelangsungan hubungan antara Korea Utara dengan Tiongkok. Hubungan Sino-North Korea mengalami pasang surut seiring dengan pergantian kepemimpinan di Korea Utara, dimana pada kepemimpinan Korea Utara yang pertama yaitu Kim Il Sung, hubungan Sino-North Korea terlihat bagus pada saat Korea Utara dan Tiongkok menandatangani perjanjian persahabatan, sementara di kepemimpinan Kim Jong Il, namun hubungan Sino-North Korea terlihat sedikit tidak baik ketika korea utara melakukan uji coba nuklirnya di kepemimpinan Kim Jong Il dan

Tiongkok yang melakukan kerjasama dengan Korea Selatan. Namun hubungan tersebut membaik karena tindakan Tiongkok yang terlihat ingin mempertahankan status Quonya. Hubungan Sino-North Korea terlihat rapuh ketika pergantian kepemimpinan yaitu dimasa Xi Jinping, dimana hubungan ini agak rusak karena Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang ke tiga, bahkan Tiongkok menentang keras uji coba nuklir tersebut dan mulai bertindak dalam penyetujuan sanksi. Jadi dalam tulisan ini, hubungan Sino-North Korea berkembang seiring dengan pergantian kepemimpinannya. (Umbas, 2016)

Dalam penelitian lain seperti pada tulisan Jih Un Kim yang berjudul *Inflated Hope, Unchanged Reality : China's Response To North Korea's Third Nuclear Test* dalam penelitian ini lebih membahas mengenai bagaimana respon Tiongkok terhadap uji coba nuklir Korea Utara yang ke tiganya. Dalam tulisan ini menjelaskan mengenai respon Tiongkok terhadap uji coba nuklir Korea Utara yang ketiganya, dalam penelitian ini menjelaskan respon Tiongkok terhadap uji coba nuklir Korea Utara yang ketiga ini cenderung tegas dan menolaknya. Pada saat Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang ke tiga tersebut, Tiongkok mendapatkan tekanan dari publik, baik itu media maupun masyarakat internasional karena mereka merupakan sekutu sekaligus mitra dagang. Oleh sebab itu Tiongkok memanggil kedutaan besar Korea Utara untuk membicarakan masalah uji coba nuklir tersebut disebabkan akan bisa memicu perburukan hubungan Sino-North Korea mereka. Namun jika dilihat kembali walaupun Tiongkok menolak tegas tindakan Korea Utara tersebut.Tiongkok tetap ingin mempertahankan hubungannya, mengingat Korea Utara sebagai zona penyangga untuk menghilangkan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Timur, bisa dilihat

ketika Tiongkok meningkatkan perdagangannya dengan Korea Utara pada tahun 2013 meskipun pembatasan keuangan dan ekspor telah diberlakukan setelah uji coba nuklir yang ketiganya. (Kim J.-U. , Inflated Hope, Unchanged Reality: China's Response to North Korea's Third Nuclear Test, 2015)

Untuk menyelesaikan permasalahan nuklir di Korea Utara, telah dilakukan beberapa upaya oleh negara-negara besar di dunia seperti Inggris, Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Korea Selatan, Korea Utara, seperti dalam buku "*The Six-Party Talks On North Korea*" yang ditulis oleh Mi-Yeon Hur, 2018, Palgrave Macmillan. Dalam bab II di buku ini menjelaskan tentang bagaimana upaya-upaya dari berbagai negara yang ikut dalam berkonstrubusi dalam bentuk diplomasi agar terciptanya denuklirisasi oleh Korea Utara yang menyebabkan ketidak amanan di kawasan Asia Timur. Pada saat mundurnya Korea Utara dari perjanjian Nonproliferasi nuklir tahun 2003, mulailah diadakannya perundingan enam negara yang disebut sebagai *Six Party Talks*, negara tersebut adalah Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok,Rusia, Korea Selatan dan Korea Utara, namun pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan damai. Dalam pertemuan tersebut Tiongkok sangat berperan penting dalam menjaga keutuhan rezim dari Korea Utara, dimana pada pemerintahan presiden Bush, Korea Utara dianggap sebagai Poros Kejahatan dunia oleh sebab itu Amerika Serikat ingin melakukan perubahan rezim namun Tiongkok enggan karena apabila perubahan rezim terjadi, akan memberikan hal yang buruk bagi Tiongkok karena akan terjadinya perpindahan penduduk Korea Utara ke Tiongkok, oleh sebab itulah Tiongkok enggan adanya perubahan rezim dan tetap ingin adanya pertemuan dan negosiasi yang tidak berujung pada kekuatan militer atau perubahan rezim. (Hur, 2018)

Dengan dilakukannya percobaan nuklir oleh Korea Utara pada tahun 2016 tersebut, membuat negara tetangga menjadi risau dan marah seperti layaknya korea selatan yang menganggap nuklir Korea Utara sebagai ancaman. Oleh sebab itu Korea Selatan perlu untuk mengantisipasi terjadinya ancaman dari nuklir Korea Utara dengan cara menyepakati tawaran Amerika Serikat untuk meletakkan salah satu pertahanan anti misil amerika tersebut di korea selatan. Namun kebijakan tersebut justru malah membuat Tiongkok marah dan menentang hal tersebut seperti dalam Report yang ditulis oleh Ethan Meick dan Nargiza Salidjanova yang berjudul "*China's Response to U.S.- South Korean Missile Deffense System Deployment and its Implications"* dalam tulisan ini membahas mengenai respon Tiongkok dalam Kebijakan Amerika Serikat terkait pengadaan THAAD di korea selatan. THAAD(*Terminal High Altitude Area Defense*) merupakan salah satu bagian dari sistem pertahanan rudal balistik yang dimiliki oleh amerika serikat, perangkat anti misil ini sebuah sistem yang sangat mudah untuk di tempatkan maupun dipindahkan. Sistem pertahanan ini dapat melindungi dari ancaman yang datang seperti ancaman rudal balistik yang bersifat terminal atau taktikal dalam jarak 200 kilometer dan dengan ketinggian 150 kilometer. Namun THAAD ini yang ditempatkan di korea selatan atas kebijakan korea selatan tersebut justru malah di kecam bahkan ditentang oleh Tiongkok dikarenakan dalam THAAD ini mempunyai kapasitas radar dari AN/TPY-2 dengan X-band-nya yang menjadi salah satu alasan penentangan tersebut. Dengan estimasi jarak hingga 3000km, radar ini sudah dengan sangat mudah dapat melacak persenjataan Tiongkok secara langsung walaupun tidak secara keseluruhan, oleh sebab itulah THAAD ini menjadi ancaman

bagi Tiongkok karena dapat mengancam keamanan nasional negaranya. (Salidjanova, 2017)

Pada dasarnya setiap tindakan pasti ada motivasi atau alasan dibalik berjalannya tindakan tersebut, seperti dalam Report yang di tulis oleh Emma Chanlett-Avery dan Sharon Squassoni yang berjudul *"North Korea's Nuclear Test: Motivations, Implications, and U.S. Options"* dalam tulisan ini lebih membahas bagaimana motivasi Korea Utara untuk melakukan tindakan Kontroversial yakni melakukan tes uji coba nuklirnya. Uji coba nuklir Korea Utara pertama kali dilakukan pada 9 Oktober 2006, uji coba tersebut mengundang reaksi yang keras dari masyarakat internasional dan negara-negara di sekitarnya termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat selaku negara super power menentang keras aksi dari Korea Utara dan memberikan sanksi bersama dengan DK PBB. Tujuan dasar dari Amerika Serikat dalam pemberian sanksi tersebut yaitu untuk mencegah adanya proliferasi senjata pemusnah massal. Penelitian ini mengatakan tes nuklir yang dilakukan Korea Utara didorong oleh rasa tidak aman dalam rezim dan takut akan serangan oleh Amerika Serikat, setelah dicap sebagai bagian dari "poros kejahatan" oleh presiden Amerika Serikat yakni Bush pada tahun 2002. Korea Utara mungkin telah menarik pelajaran dari invasi Amerika ke Irak oleh sebab itulah Korea Utara percaya dengan mengembangkan dan mendemonstrasikan kemampuan nuklir akan dapat menghalangi serangan Amerika Serikat. (Squassoni, 2006)

1.7 Landasan Teori/Konsep/Pendekatan

Rational Choice

Untuk mendukung argumen di dalam makalah ini, penulis menggunakan Teori *Rational Choice* yang digagas oleh Graham T. Allison Dalam bukunya yang berjudul *Essence of Decision : Explaning the Cuban Misile Crisis.* Graham menyatakan bahwa kondisi domestik negara dalam pengambilan keputusan akan mempengaruhi respon, sikap ataupun kebijakan luar Negeri suatu Negara. Teori ini digunakan sebagai alat untuk menjelaskan pilihan dan melihat perilaku para pembuat keputusan, sehingga negara atau aktor pada dasarnya bertindak secara rasional yang tak lebih pada mempertimbangkan kekurangan dan keuntungan dari tindakan tersebut. Kemudian aktor itu akan mengambil salah satu pilihan yang paling menguntungkan (Allison G. T., 1971)

Menurut Graham T. Allison (Allison G. T., 1969, p. 690), *Rational Choice Theory* terbagi menjadi tiga model dalam proses pengambilan keputusannya yaitu: pertama *Rational Actor Model,* kedua *The Organization Process Models, ketiga The Govermental (Bureaucratic) Politics Model*. Disini penulis memakai model pertama yaitu *Rational Actor Model* karena model tersebut sesuai dengan tingkat level analisis yang akan penulis gunakan sebagai alat untuk menjawab rumusan masalah. Pasalnya penulis menggunakan negara (*actor*) sebagai level analisis dan dalam model ini dapat menggambarkan alasan mengapa memilih pilihan rasional tersebut untuk membuat keputusan melalui tahapan-tahapan yang telah tertera. Melalui model ini pula menghasilkan analisis dari pilihan yang telah dibuat oleh negara dengan mempertimbangkan *cost* dan *benefit* untuk mencapai kepentingannya.

Rational Actor Model

Rational Actor Model merupakan proses pembentukan kebijakan atau keputusan suatu negara agar negara tersebut dapat membuat suatu pilihan yang rasional dengan melihat tatanan lingkungan internasional yang ada. Pengambilan keputusan tersebut mengambil pilihan yang paling di prioritaskan di antara pilihan-pilihan yang tersedia (Allison G. T., 1971, p. 10).

Model ini banyak dikenal sebagai model strategi atau model aksi-reaksi, yang mana biasa digunakan untuk menerapkan tiap respon sebagai perhitungan rasional untuk menghadapi tindakan yang dilakukan oleh aktor lain. Sebelum membuat suatu rencana dari setiap pilihan yang ada, negara sebagai aktor rasional mempunyai perhitungan terhadap pilihan, informasi, dan resiko ketika mengambil pilihan atau keputusan tersebut. Dengan asumsi, pembuat keputusan tersebut dapat menghitung nilai yang diharapkan dari setiap pilihan, membandingkan semua pilihan dan memilih pilihan yang paling rasional yang menguntungkan (Allison G. T., 1971, p. 29).

Adapun beberapa tahapan dalam mempengaruhi *Rational Actor Model* ialah:

1. ***Goals and Objectives***

   Aktor tersebut dapat menentukan kepentingan yang paling di prioritaskan dalam mengambil tindakan atau keputusan seperti keamanan nasional dan kepentingan nasional. Namun keputusan atau kepentingan tersebut harusnya mengandung konsekuensi yang paling menguntungkan.

2. Alternatif

Dalam mengambil keputusan, tentu saja aktor tersebut mempunyai beberapa alternatif sebelum di tetapkannya suatu keputusan, namun disini aktor akan mengambil tindakan atau keputusan yang paling relevan untuk meminimalisir kerugian yang didapatkan dalam suatu perkara.

3. Konsekuensi

Konsekuensi adalah hasil yang akan terjadi apabila pilihan-pilihan alternatif tersebut akan ditetapkan.

4. Pilihan

Aktor telah memilih alternatif-alternatif yang ada dengan konsekuensi yang berada pada tingkat keuntungan yang teratas dalam hal goals dan objective.

Berdasarkan penjelasan Allison di atas, maka teori ini dapat menjelaskan secara tepat dan relevan latar belakang Tiongkok mengimplementasikan sanksi DK PBB terhadap Korea Utara dengan tahapan argumen sebagai berikut:

1. Goals and Objectives

Disini aktor yang berperan dalam penetapan goals adalah Tiongkok. Dimana Goals Tiongkok tersebut merupakan **stabilitas kawasan**. Hal ini didorong oleh rasa ketidakamanannya terhadap dampak yang diberikan oleh uji coba nuklir Korea Utara tersebut.

2. Alternatif

Untuk mencapai goals tersebut Tiongkok justru telah melakukan berbagai cara agar goals tersebut tercapai. Dan cara tersebut telah

dilakukan Tiongkok berupa : **pertama opsi negosiasi, kedua opsi sanksi dan yang terakhir opsi unilateral.**

3. Konsekuensi

ketika berbagai cara dari alternatif itu telah dilakukan. Tentu saja berbagai cara tersebut mempunyai dampak yang dilihat dari keuntungan dan kerugiannya. Hal ini bisa dilihat ketika Tiongkok menerapkan **opsi pertama yang muncul justru Deadlock, opsi kedua ketidakstabilan sementara perekonomian Korea Utara dan opsi yang ketiga keruntuhan rezim.**

4. Pilihan

Aktor memilih pilihan dari alternatif yang ada dan hal tersebut dilihat berdasarkan konsekuensi yang telah didapatkan. **Pilihan yang diambil Tiongkok adalah opsi kedua yaitu opsi sanksi karena opsi inilah yang paling rasional sementara jika dilihat dari kedua opsi lainnya karena dengan penerapan opsi sanksi tersebut Tiongkok justru dapat memainkan peran ganda yaitu sebagai mitra pendukung denuklirisasi dan sekutu strategis Korea Utara**

Sehingga dalam penulisan ini, menggunakan teori *Rational Actor* agar bisa lebih banyak mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi Tiongkok dalam memberikan respon yang terbilang tegas kepada Korea Utara.

1.8 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk membantu peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah pada suatu gejala, fakta, dan realita yang dihadapi, sekaligus memberikan pemahaman dan pengertian baru atas masalah tersebut sesudah menganalisis data yang ada (Dr. J.R. Raco, 2010). Sehingga dalam penelitian ini mencari alasan perubahan kebijakan Tiongkok dalam menangani permasalahan program nuklir Korea Utara dan juga pengaruhnya terhadap hubungan bilateral kedua negara tersebut. Penelitian yang membahas mengenai Nuklir Korea Utara tersebut memang cenderung cukup banyak, namun secara detail membahas mengenai perubahan kebijakan Tiongkok dalam menangani permasalahan nuklir Korea Utara pada periode pemerintahan Xi Jinping tersebut belum banyak diteliti. Karena hal tersebut, maka penelitian ini akan membahasnya.

b. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini ialah Tiongkok karena Tiongkoklah yang berperan dalam penghentian program nuklir Korea Utara. Sementara Korea Utara menjadi objek dikarenakan negara tersebut yang melakukan uji coba nuklir yang membuat kawasan Asia Timur menjadi tidak stabil. Hal inilah yang ingin diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

c. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan pengumpulan data terkait peran pemerintah, teknik yang digunakan adalah dengan melakukan studi literatur dari tulisan-tulisan baik jurnal maupun laporan akademik dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini sendiri akan mengambil dari beberapa sumber literatur seperti google books, hasil penelitian berupa PDF dari masing-masing institusi *research.*

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan ialah tulisan-tulisan akademik dan buku-buku pendukung yang terkait dengan penelitian ini serta sumber-sumber dari media-media internasional. (Sekaran, 2006)

d. Proses Penelitian

Metode selanjutnya analisis data dari data yang didapat. Teknik dalam mengelola data yang sudah didapatkan akan dianalisis dengan beberapa tahap yakni melakukan kajian atau studi terkait data yang sudah ditemukan, yang bermaksud untuk pendalaman materi yang juga dilakukan dengan membaca isi masing-masing sumber agar ditemukan gagasan. Setelah itu tahap selanjutnya adalah pencatatan hasil kajian dan hasil bacaan agar gagasan yang muncul tersebut dapat disimpan.

Tahap selanjutnya ialah pembagian materi-materi hasil kajian yang berdasarkan catatan dengan membagi menjadi beberapa sub-bab yang akan menjadi bagian dari pembahasan terkait penelitian berdasarkan metode dari buku penelitian (Creswell, 2014). Selanjutnya adalah penjabaran dengan melakukan deskripsi dari hasil pembagian dari sub-bab terkait. Dan langkah terakhir adalah hasil pemikiran

atau interpretasi dari temuan dan deskripsi yang terkait yang akan membuat sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitia.